

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM**

**(Kasus UMKM Keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet
Kabupaten Mojokerto)**

**Local Government Efforts In Business Development By Small And Medium
Enterprises (SME) Empowerment**

**(Case of Small And Medium Enterprises of Yam and Cassava Chip
Industries in Pacet Sub-district Mojokerto District)**

JURNAL

Oleh:

Avilia Andriani Indah Sari



PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM**

**(Kasus UMKM Keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet
Kabupaten Mojokerto)**

Oleh:

Avilia Andriani Indah Sari

125040100111091

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

JURNAL

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1)**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS PERTANIAN

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

MALANG

2016

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI NASKAH JURNAL

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM**

**(Kasus UMKM Keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet
Kabupaten Mojokerto)**

**Local Government Efforts In Business Development By Small And Medium
Enterprises (SME) Empowerment
(Case of Small And Medium Enterprises of Yam and Cassava Chip
Industries in Pacet Sub-district Mojokerto District)**

Nama Mahasiswa : Avilia Andriani Indah Sari

NIM : 125040100111091

Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian

Program Studi : Agribisnis

Menyetujui : Dosen Pembimbing

Disetujui,
Pembimbing,

Setiyo Yuli Handono, SP.,MP., MBA

NIP.19820716 200604 1 001

Diketahui,

Ketua Jurusan

Mangku Purnomo, SP., M.Si., Ph.D

NIP. 19770420 200501 1 001

Tanggal Persetujuan :

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM**

**(Kasus UMKM Keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet
Kabupaten Mojokerto)**

**Local Government Efforts In Business Development By Small And Medium
Enterprises (SME) Empowerment**

**(Case of Small And Medium Enterprises of Yam and Cassava Chip
Industries in Pacet Sub-district Mojokerto District)**

Avilia Andriani Indah Sari¹⁾, Setiyo Yuli Handono²⁾

¹⁾Mahasiswa Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Malang

²⁾Dosen Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Malang

¹⁾E-mail: aviliaandriani@yahoo.com

ABSTRACT

Small and Medium Enterprises (SME) have a big role for Indonesia in terms of national income and recruitment of labor. One of the Small and Medium Enterprises (SME) is yam and cassava chips industries in Pacet Sub-district Mojokerto Distric. However, yam and cassava chip industries have some problems which disrupt the development of their business. These hindrances on the development of the business make the Small and Medium Enterprises (SME) may affect the ability of the industry to compete and survive in ASEAN Economic Community (AEC). Empowerment from local government to the Small and Medium Enterprises (SME) become one of good solution for the problem of Small and Medium Enterprises (SME) (Sholeh, 2013). With the good support and empowerment from local government to the SME, the yam and cassava chip industry can develop, compete and survive in ASEAN Economic Community (AEC).

The result of the research are 1) there are 4 SME empowerment programs for the yam and cassava chips in Pacet Sub-district in accordance with 3 forms of Small and Medium Enterprises (SME) empowerment forms in Regional Regulation Mojokerto Distric Number 19 in 2008 about the empowerment of Cooperative, Small and Medium Enterprises (SME). The four programs are SME supervisor, SME exhibition, capital aid for SME, and legality brand assistance for SME. 2) All of the four empowerment programs have bring a good impact to the business development of yam and cassava chip industries in Pacet Sub-district, Mojokerto District. Almost all yam and cassava chip industries in Pacet Sub-district started from quality of human resource, improvement product for sale, market akses, marketing business partnership, until the legality brand awareness.

Key Word: *Small and Medium Enterprises (SME) Empowerment, Local Government Efforts, Small and Medium Enterprises (SME)*

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi penting bagi Indonesia dalam pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja. Salah satunya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Namun, pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong tersebut memiliki banyak permasalahan yang menghambat dalam mengembangkan usaha. Terhalangnya perkembangan usaha tersebut di khawatirkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak mampu bersaing dan bertahan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pemberdayaan UMKM dari pemerintah daerah menjadi salah satu jalan keluar dalam mengatasi masalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Sholeh, 2013). Dengan pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah, pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong dapat berkembang, bersaing, dan bertahan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Hasil yang didapatkan adalah 1) terdapat 4 program Pemberdayaan UMKM bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet yang sesuai dengan 3 bentuk Pemberdayaan UMKM di Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 19 tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keempat program tersebut adalah Pembinaan UMKM, Pameran UMKM, Bantuan Modal, dan Bantuan Legalitas Merk Gratis. 2) Keempat program Pemberdayaan UMKM berdampak baik pada pengembangan usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet. Hampir seluruh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong mengalami peningkatan mulai dari kualitas sumber daya manusia, perbaikan produk untuk dijual, akses pemasaran, jaringan kemitraan-usaha pemasaran hingga kesadaran pentingnya legalitas merk.

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, Upaya Pemerintah Daerah, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kedudukan yang penting dalam pembangunan negara. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti mampu bertahan saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penggerak ekonomi di Indonesia (Raginum, Sudaryanto dan Wijayanti, 2014). Menurut Tedjasuksmana (2014), terdapat beberapa peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor di Indonesia selalu terdapat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku ekonomi di Indonesia hampir sekitar 99% adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Andharini, 2012). Jumlah tersebut terbesar dan tersebar disetiap sektor ekonomi. Jumlah yang besar tersebut membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Setiap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selalu diiringi dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari lokal. Pemanfaatan bahan baku dari lokal membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dalam krisis ekonomi pada Tahun 1998 maupun krisis global. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga menciptakan pasar baru dan sumber inovasi (Tedjasuksmana, 2014). Bahan baku dari lokal yang digunakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi suatu produk yang baru dan kaya akan inovasi. Produk inovasi dari hasil pemikiran pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kerap menjadi daya tarik dan menciptakan pasar baru. Banyaknya

pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia juga membawa dampak positif pada pendapatan negara. Kontribusi atau dampak positif yang diberikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadikan pelaku ekonomi tersebut mendapat tempat istimewa tersendiri di Indonesia.

Salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Usaha tersebut menggunakan bahan baku komoditas Ketela dan Singkong yang banyak tumbuh dan menjadi komoditas unggulan di Kecamatan Pacet. Berlimpahnya bahan baku dan daerah yang menjadi prospek wisata membuat sebagian penduduk di Kecamatan Pacet memanfaatkan komoditas tersebut menjadi keripik. Seperti layaknya pengusaha lainnya, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto juga akan menghadapi pasar bebas di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Seperti layaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lainnya, mereka memiliki permasalahan dalam mengembangkan usaha. Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong adalah meningkatnya harga bahan baku, sumber daya manusia yang terbatas, memiliki permasalahan dalam permodalan, serta kurangnya akses pemasaran produk. Kondisi tersebut sama halnya dengan dengan pernyataan Anggraeni, Hardjanto dan Hayat (2013) bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah harga bahan baku yang meningkat, sumber daya manusia yang terbatas, masalah dalam pemodalannya, sarana dan prasarana yang masih kurang, hingga akses pasar yang masih kurang. Pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di daerah Pacet memiliki permasalahan bahan baku yang terus mengalami kenaikan harga. Di daerah tersebut Ketela dan Singkong mengalami kenaikan yang cukup besar. Kemudian dalam menjalankan usahanya pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong memiliki sumber daya manusia yang terbatas dalam pengetahuan dan keterampilan. Sumber daya manusia juga masih memiliki pola pikir untuk mengembangkan usahanya masih sedikit. Tidak heran jika usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong masih tergolong dalam usaha yang dijalankan dengan manajemen tradisional. Permasalahan modal juga menjadi masalah untuk menjalankan usaha. pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong rata-rata tidak dapat mengembangkan usaha karena terbatasnya modal untuk mengembangkan usahanya.

Pemerintah memiliki program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya untuk membantu mengembangkan usaha keripik Ketela dan Singkong dan menaikkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pemberdayaan UMKM tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Undang-Undang tersebut diturunkan kedalam pemerintah daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Bentuk perhatian pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mojokerto tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Berdasarkan peraturan daerah tersebut pemerintah menggelar program-program pengembangan usaha berupa pemberdayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Kabupaten Mojokerto, termasuk bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

Kenyataannya walau pemerintah daerah melakukan pemberdayaan, tidak banyak pelaku usaha keripik ketela dan singkong di Kecamatan Pacet yang dapat bertahan menjalankan usahanya. Ada beberapa usaha yang akhirnya gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan usaha lainnya yang serupa. Selain itu terdapat beberapa pelaku yang mengalami krisis dari modal usaha hingga bahan baku. Permasalahan tersebut menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet untuk memasuki dan bersaing dengan pengusaha lainnya di pasar global seperti

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), tidak semua permasalahan harus diatasi oleh pemerintah atau menjadi tanggung jawab pemerintah. Pihak dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) itu sendiri juga harus ikut andil atau tanggung jawab sebagai pihak internal dalam pengembangan usahanya. Kedua pihak tersebut dapat mengembangkan usaha secara bersama-sama untuk hasil pengembangan usaha yang lebih baik (Anggraeni, Hardjanto dan Hayat, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode Pengambilan Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Pacet merupakan lokasi yang memiliki pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong sebanyak 28 pelaku usaha dan paling banyak daripada daerah lainnya di Kabupaten Mojokerto. Banyaknya pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong didasarkan pada komoditas Ketela dan Singkong yang menjadi salah satu komoditas unggulan di daerah tersebut. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong menjadi produk unggulan dari daerah tersebut. Sehingga pemilihan lokasi tersebut dirasa sesuai dengan judul penelitian.

Metode Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini merupakan pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang terdaftar dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto dan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan informan memiliki informasi luas tentang Pemberdayaan UMKM dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan teknik *purposive*, penelitian ini mengambil informan sebanyak 8 orang. Kedelapan informan tersebut terdiri dari 1 informan dari pihak pemerintah dan 7 informan dari pelaku usaha Keripik Ketela dan Singkong.

Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan teknik dengan cara datang langsung dan melihat langsung keadaan lokasi penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan cara wawancara merupakan teknik pengambilan data dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat. Pedoman wawancara tersebut dibuat oleh peneliti sesuai dengan topik penelitian serta sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Terakhir adalah teknik pengumpulan data dengan cara dokumen data-data yang didapatkan. Pengambilan data dengan cara tersebut dapat menunjang data penelitian yang diambil melalui observasi dan wawancara. Nantinya data tersebut dapat ditampilkan kedalam pembahasan penelitian.

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan dilakukan analisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman (1984) dalam Suprayogo dan Tobroni (2001) menyatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyerdehana, pengabstakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dilakukan untuk membuat analisis yang tajam, terdorong, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Selanjutnya penyajian hasil dari penelitian akan dipaparkan berdasarkan temuan-temua di lapangan dengan bentuk deskriptif naratif. Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan oleh informan terhadap masalah yang diteliti sehingga mengetahui penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Terakhir

adalah penarikan kesimpulan mulai dari permulaan data, mencari arti, pendelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi. Kemudian peneliti berkompeten untuk membentuk kesimpulan-kesimpulan dan tetap terbuka, namun pada mulanya belum jelas dan kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Perihal Pemberdayaan UMKM pada Pengembangan Usaha Keripik Ketela dan Singkong

Anggraeni, Hardjanto dan Hayat (2013), yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memang perlu dikembangkan karena pengembangan ini akan berpengaruh penting pada peningkatan perekonomian masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan UMKM diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Terdapat tiga bentuk pemberdayaan UMKM yang direalisasikan kedalam 4 program pemberdayaan UMKM bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Keempat program pemberdayaan UMKM tersebut adalah Pembinaan UMKM dan Pameran UMKM yang masuk dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan Serta Fasilitasi Kelembagaan dan Usaha, Pemberian Informasi dan Pendampingan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang masuk dalam bentuk Fasilitasi Perkuatan Modal, serta Bantuan Legalitas Merek Gratis yang masuk dalam bentuk Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Keempat pemberdayaan tersebut dirasa sesuai untuk membantu pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan program-program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto merupakan pemberdayaan dengan strategi reformis. Dwidjowijoto dan Wrihatnolo (2007) menyatakan bahwa pemberdayaan dengan strategi reformis merupakan pemberdayaan yang mempersoalkan praktik di lapangan atau kebijakan operasional. Pemberdayaan dengan strategi reformis akan difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kinerja operasional dengan membenahi pola kebijakan, peningkatan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan dan sebagainya.

a. Pendidikan dan Pelatihan Serta Fasilitasi Kelembagaan dan Usaha

Pemberdayaan UMKM dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha merupakan pemberdayaan yang paling dasar bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong. Pemberdayaan UMKM dalam bentuk tersebut akan memberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia pada pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong. Sehingga pelaku usaha yang mendapat Pemberdayaan UMKM dalam bentuk tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan usahanya. Terdapat 2 program yang masuk dalam Pemberdayaan UMKM dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan usaha. Kedua bentuk program tersebut adalah Pembinaan UMKM dan Pameran UMKM. Kedua program tersebut akan membantu pelaku usaha dalam pengembangan pendidikan dan keterampilan hingga pemasaran produk mereka.

1. Pembinaan UMKM

Tujuan dari program Pembinaan UMKM adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha. Program Pembinaan UMKM tersebut merupakan program yang penting karena bertujuan untuk mengubah atau mengembangkan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan usahanya. Terdapat dua pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto kepada pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong dalam program

Pembinaan UMKM. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan pembukuan keuangan dan pelatihan pengemasan produk.

Pemberian kedua pelatihan tersebut didasarkan dari kebutuhan dan permasalahan pada usaha keripik Ketela dan Singkong. Pada pemberian pelatihan pembukuan keuangan didasarkan dari tidak adanya manajemen keuangan pada usaha keripik Ketela dan Singkong. Sedangkan pemberian pengemasan produk dikarenakan melihat produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong masih perlu dikembangkan atau diperbaiki. Pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong sudah memiliki kemasan yang baik seperti halnya produk keripik pada umumnya. Tetapi masih beberapa pelaku usaha yang masih memiliki kemasan kurang baik dan kurang menarik. Kemasan yang kurang baik dan kurang menarik tersebut berupa kemasan plastik yang transparan tanpa adanya merek pada kemasan.

2. Pameran UMKM

Pameran UMKM yang diberikan oleh pemerintah daerah menjadi suatu upaya dalam meningkatkan daya saing dan akses pasar bagi produk pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong (Anggraeni, Hardjanto dan Hayat, 2013). Kesempatan untuk mengikuti Pameran UMKM akan sangat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengenalkan dan mempromosikan usaha serta melihat peluang pasar bagi produk dan memperluas jaringan kerja sama. Pemanfaatan tersebut didasari dari terbatasnya akses permodalan yang juga berdampak dari terbatasnya promosi produk. Keikutsertaan pelaku usaha dalam Pameran UMKM dapat memberi peluang bagi pelaku usaha untuk menembus pasar global. Sehingga pelaku usaha dapat bersaing dengan produk global dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Program kegiatan Pameran UMKM selalu terselenggara setiap tahunnya. Penyelenggaraan berdasarkan instansi terkait dan selalu bertepatan dengan hari besar disetiap tahunnya. Program kegiatan pameran UMKM dibagi menjadi 3 tingkatan.

Tabel 1. Tingkatan Pameran UMKM

Jenjang Tingkatan	Kawasan pelaksanaan	Jumlah pelaksanaan*
Pamera UMKM tingkat lokal	Pelaksanaan Pameran UMKM hanya pada kawasan daerah, yaitu kawasan Kabupaten Mojokerto	±5 kali dalam setahun
Pameran UMKM tingkat regional	Pelaksanaan Pameran UMKM hanya pada kawan provinsi, yaitu kawasan Provinsi Jawa Timur	±3 kali dalam setahun
Pameran UMKM tingkat nasional	Pelaksanaan Pameran UMKM dilaksanakan di kawasan Nasional, yaitu seluruh Indonesia	±1 kali dalam setahun

* = Jumlah pelaksanaan bergantung pada banyaknya tawaran dan hari besar yang diyakini pada kawasan daerah pelaksanaan.

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Tingkat pertama adalah pameran UMKM tingkat lokal yang diselenggarakan di kawasan Kabupaten Mojokerto. Pada Pameran UMKM tingkat lokal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) berkerja sama dengan instansi Kabupaten Mojokerto. Pameran UMKM tingkat lokal dapat terselenggara kurang lebih sebanyak 5 kali dalam setahun dan bergantung pada banyaknya tawaran dan hari besar yang berlaku di kawasan Kabupaten Mojokerto.

Tingkat kedua adalah pameran UMKM tingkat regional yang diselenggarakan di kawasan Provinsi Jawa Timur. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau pihak swasta yang berdomisili di Jawa Timur pada Pameran UMKM tingkat regional. Pameran UMKM tingkat regional dapat diselenggarakan kurang lebih sebanyak 3 kali dalam setahun dalam setahun. Tetapi angka penyelenggaraan tersebut bergantung

pada banyaknya tawaran dan hari besar yang berlaku di kawasan regional yaitu Provinsi Jawa Timur. Tingkatan yang terakhir adalah Pameran UMKM tingkat nasional yang biasanya diselenggarakan di kawasan seluruh Indonesia. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan instansi nasional atau pemerintah pusat pada Pameran UMKM tingkat nasional. Pameran UMKM tingkat nasional dapat terselenggara kurang lebih sebanyak 1 kali dalam setahun dan penyelenggaraan bergantung pada banyaknya tawaran dan hari besar yang berlaku di kawasan nasional.

b. Fasilitas Perkuatan Modal

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) bekerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom) untuk memberikan fasilitas perkuatan modal untuk mengatasi permasalahan modal pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). program yang diselenggarakan dengan PT. Telkom adalah Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Salah satu bantuan yang diberikan dalam program tersebut adalah dana bergulir yang dipinjamkan untuk pengembangan usaha. Namun pelaku usaha yang dapat meminjam modal pada Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan pelaku usaha yang memiliki kesepatan dengan PT. Telkom untuk bermitra. Terdapat 4 jumlah yang dipinjamkan modal bagi kepada pelaku usaha yang bermitra dengan PT. Telkom.

Tabel 2. Jumlah Pinjaman Modal Dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Telkom

No	Jumlah pinjaman yang diberikan	Jasa Administrasi/ tahun
1	s/d Rp 10.000.000	6%
2	>Rp 10.000.000 s/d Rp 30.000.000	6%
3	>Rp 30.000.000 s/d Rp 50.000.000	6%
4	>Rp 50.000.000	6%

Sumber: www.pkbl-telkom.com, 2007

Program yang diberikan oleh PT. Telkom menjadi salah satu program yang dapat dipandang sebagai upaya pengembangan usaha yang dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sebagai informan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto memberikan informasi seputar Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan bantuan serta fasilitas apa saja yang akan didapatkan pelaku usaha. Selain menjadi informan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mojokerto juga menjadi tempat pengambilan formulir atau blanko untuk mengikuti Program Kemitraan Bina Usaha (PKBL) dari PT. Telkom.

c. Fasilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Kabupaten Mokokerto memberikan bantuan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berupa legalitas merek secara gratis. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) pada program kegiatan tersebut bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Mojokerto serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) Provinsi Jawa Timur. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM) akan memberikan informasi dan membantu dalam tata cara pendaftaran dalam pelaksanaan Bantuan Legalitas Merek Secara Gratis. Selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh instansi yang bekeja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DISKOPUMKM).

Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Perihal Pemberdayaan UMKM pada Pengembangan Usaha Keripik Ketela dan Singkong.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha melalui program-program pemberdayaan UMKM tentunya memiliki dampak pada pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong. Dampak yang ditimbulkan tentunya harus dapat membantuk pelaku usaha untuk mengembangkan usaha. dampak yang ditimbulkan dapat dijabarkan menjadi 5 perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaikan Pendidikan (Better Education)

Terdapat perbaikan pendidikan (*better education*) pada pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong. Perbaikan pendidikan tersebut dilihat dari pengembangan usaha berupa penggunaan pembukuan keuangan usaha sebagai manajemen keuangan yang sederhana, pengemasan yang lebih baik dan layak jual hingga pemahaman legalitas merek bagi kekuatan produk mereka secara hukum. Penggunaan pembukuan keuangan usaha hampir seluruh pelaku usaha tidak menerapkan pembukuan keuangan. Hal tersebut didasarkan dari ketidakinginan pelaku usaha untuk menerapkan pembukuan keuangan pada usahanya dikarenakan menurut mereka penerapan pembukuan keuangan pada usaha membuat mereka ribet dan menyita waktu mereka. pada pengemasan produk, hampir seluruh pelaku usaha yang menjadi kunci informan (*key informan*) mengalami perbaikan kemasan yang ditimbulkan dari adanya pertambahan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha pada pengemasan produk. Rata-rata dari pelaku usaha mengalami perubahan kemasan yang sesuai dengan keinginan konsumen.

2. Perbaikan Aksesibilitas (Better Accessibility)

Melalui pemberdayaan UMKM, pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet dapat memperbaiki aksesibilitasnya untuk mengembangkan usahanya lebih baik. Pada penelitian ini terdapat 2 aksesibilitas yang dilihat, pertama adalah aksesibilitas pembiayaan dan aksesibilitas pemasaran. Akses sumber pembiayaan bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet masih minim. Minimnya akses pendanaan dikarenakan pelaku usaha tidak memiliki informasi berupa bantuan modal dan kurang aktifnya pelaku usaha untuk mencari informasi dan akses bantuan modal bagi usahanya. Lokasi yang cukup jauh dari pusat pemerintahan juga membuat mereka tidak aktif untuk menjalin hubungan dengan pihak pemerintah. Sehingga tidak heran jika tawaran bantuan modal jarang tertuju kepada mereka.

Berbeda dengan akses sumber pendanaan bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet, akses penasarannya usaha keripik Ketela dan Singkong mengalami perbaikan. Menurut pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet rata-rata perbaikan tersebut disebabkan keikutsertaan usahanya pada Program Pameran UMKM yang diadakan oleh pemerintah. Perbaikan tersebut dapat berupa semakin banyaknya konsumen yang membeli produk usaha mereka hingga terjalinnya kemitraan usaha untuk menjual produk mereka sehingga akses jangkauan pemasaran mereka menjadi semakin luas.

3. Perbaikan Tindakan (Better Action)

Adanya perbaikan pendidikan (*better education*) yang berdampak pada sumber daya manusia yang semakin baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan membuat pelaku usaha dapat memutuskan keputusan yang tepat bagi usahanya. Melalui pertimbangan dengan pengetahuan yang didapatkan membuat pelaku usaha memiliki keinginan dan keputusan yang baik dalam pengembangan usahanya. Tindakan yang baik tersebut dapat dilihat dari adanya pelaku usaha yang menggunakan pembukuan keuangan sebagai manajemen keuangan usaha yang sederhana, pemakaian kemasan yang baik dan layak jual, pelegalan merek secara hukum hingga memutuskan untuk menjalin kemitraan dalam pemasaran produk setelah adanya pemberdayaan UMKM..

4. Perbaikan Kelembagaan (Better Institutional)

Pemberdayaan UMKM membawa perbaikan kelembagaan (*better institutional*) bagi usaha keripik Ketela dan Singkong. rata-rata pelaku usaha memiliki jaringan kemitraan-usaha baru minimal 1 jaringan. Pertambahan jaringan kemitraan-usaha pemasaran berdampak pada jangkauan pasar yang lebih luas. Hal tersebut dikarenakan setiap jaringan kemitraan-usaha pemasaran memiliki jangkauan daerah pemasaran yang berbeda. Sehingga hal tersebut menguntungkan pelaku usaha dalam menjual produknya dan memperluas jangkauan pasar yang lebih luas bagi produknya. Pertambahan jaringan kemitraan-usaha pemasran tersebut didapatkan dari keikutsertaan pelaku usaha pada Program Pameran UMKM.

5. Perbaikan Usaha (Better Business)

Pemberdayaan UMKM membawa dampak perbaikan usaha (*better business*) dari segi manajemen keuangan, produk yang dihasilkan lebih baik dan bagus, jangkauan pasar dan jaringan kemitraan-usaha pemasaran lebih luas hingga kesadaran atas legalitas merek secara hukum diperlukan. Perbaikan usaha (*better business*) sudah didapat mulai dari adanya perbaikan pendidikan (*better education*) hingga perbaikan kelembagaan (*better institutional*). Perbaikan usaha dimulai dari perbaikan manajemen keuangan secara tertulis pada setiap usaha. Perbaikan produk yang dihasilkan juga dialami oleh pelaku usaha yang mengikuti pemberdayaan UMKM. Perbaikan produk dari segi kemasan dan label dilakukan saat pelaku usaha memiliki peningkatan pengetahuan. Mereka juga cenderung untuk memperbaiki kemasan karena memiliki anggapan semakin baik kemasan akan semakin baik respon konsumen untuk membeli produk mereka. Terakhir akses pemasaran dan jaringan kemitraan-usaha pemasran semakin luas. Perluasan akses pemasaran dan jaringan kemitraan-usaha pemasaran disebabkan oleh keikutsertaan mereka pada Program Pameran UMKM.

6. Perbaikan Pendapatan (Better Income)

Perbaikan usaha (*better business*) mambawa perbaikan pendapatan (*better income*) bagi pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong. Tidak semua perbaikan pendapatan (*better income*) sama pada setiap pelaku usaha.

Tabel 3. Kondisi Awal dan Kondisi Akhir Adanya Pemberdayaan dalam Perbaikan Pendapatan (*Better Income*).

Pelaku Usaha	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
SU	Rp 6.500.000,00/ Bulan	Rp 7.500.000,00/ Bulan
KO	RP 6.000.000,00/ Bulan	Rp 7.000.000,00/Bulan
WA	Rp 7.000.000,00/ Bulan	Rp 8.000.000,00/ Bulan
SA	Rp 7.000.000,00/ Bulan	Rp 10.000.000,00/ Bulan
WI	Rp 7.000.000,00/ Bulan	Rp 8.500.000,00/ Bulan
WR	Rp 5.00.000,00/ Bulan	Rp 5.000.000,00/ Bulan
TU	Rp 5.000.000,00/ Bulan	Rp 5.000.000,00/ Bulan

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

rata-rata pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet mengalami perbaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan yang dialami oleh pelaku usaha hingga 40%. Seluruh perbaikan usaha (*better business*) didasarkan adanya perbaikan-perbaikan yang dimulai dari perbaikan pendidikan (*better education*) hingga perbaikan usaha (*better business*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pada implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang pemberdayaan UMKM, terdapat 4 program Pemberdayaan UMKM untuk membantu mengembangkan usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet. Keempat program tersebut adalah Pembinaan UMKM dan Pemeran UMKM yang mengacu pada bentuk Pendidikan dan

Pelatihan Serta Fasilitasi Kelembagaan dan Usaha, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengacu pada Fasilitasi Perkuatan Modal, dan Bantuan Legalitas Merek Gratis yang mengacu pada Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

2. Dampak yang ditimbulkan dapat dijabarkan menjadi 6 perbaikan. Kelima perbaikan tersebut adalah perbaikan pendidikan (*better education*), perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), perbaikan tindakan (*better action*), perbaikan kelembagaan (*better institutional*), perbaikan usaha (*better business*), perbaikan pendapatan (*better Income*). Berdasarkan keenam perbaikan tersebut, Pemberdayaan UMKM dapat dikatakan membantu pengembangan usaha keripik Ketela dan Singkong. Hampir seluruh pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong mengalami peningkatan mulai dari kualitas sumberdaya manusia, perbaikan produk untuk dijual, akses pemasaran, jaringan kemitraan-usaha pemasaran hingga kesadaran pentingnya legalitas merek. Tetapi masih ada beberapa pelaku usaha yang tidak mengalami pengembangan. Hal tersebut dikarenakan tidak didukungnya keinginan sumber daya manusia untuk lebih baik lagi dalam menjalankan usaha.

Saran

Pemberdayaan UMKM bagi usaha keripik Ketela dan Singkong di Kecamatan Pacet sudah dapat membantu pengembangan usaha dengan baik. Tetapi masih ada beberapa pelaku usaha yang tidak dapat berkembang usahanya melalui Pemberdayaan UMKM tersebut dan hal tersebut dikarenakan kurangnya dukungan sumber daya manusia yang dimiliki oleh usaha keripik Ketela dan Singkong. Pengembangan usaha dengan dukungan eksternal sudah tersedia dan dukungan tersebut berupa upaya pemerintah dalam membantu pengembangan usaha. Sedangkan untuk mengoptimalkan dukungan eksternal tersebut diperlukan dukungan internal dan dukungan internal tersebut dapat berupa dukungan dari dalam usaha itu sendiri. Perlunya perbaikan sumber daya manusia pada pelaku usaha keripik Ketela dan Singkong karena masih terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak ingin menambah atau menerapkan apa yang mereka dapat dalam Pemberdayaan UMKM. Pemerintah perlu mencoba pendekatan yang lebih instens kepada pelaku usaha tersebut. Sehingga pelaku usaha tersebut dapat memiliki pemikiran yang sama dengan pemerintah dan diharapkan tercapai tujuan dari Pemberdayaan UMKM tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andharini, S.N. 2012. Pemasaran Kewirausahaan dan Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jurnal Ekonomika Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Vol. 03 No. 02 [Online]. Tersedia di <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=361837> (Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2016).
- Anggraeni, F.D. Hardjanto, I. dan Hayat, A. 2013. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.1 No.6 [Online]. Tersedia di <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/195/175> (Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2016).
- Dwidjowijoto, R.N. dan Wrihatnolo, R.R. 2007. Manajemen Pemberdayaa: Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Kabupaten Mojokerto. 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Sekretariat Daerah: Kabupaten Mojokerto.

- Ragimun, Sudaryanto, Wijayanti, R.R. 2014. Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN [Online]. Tersedia di <http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/strategi-pemberdayaan-umkm-menghadapi-pasar-bebas-asean> (Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2016).
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Suprayogo, I. dan Tobroni. (2001). Metodologi Penelitian Sosial-Agama. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Tedjasuksmana, Budiarto. 2015. Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (2015). In The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014 Towards a New Indonesia Business Architecture Sub Tema: "Business And Economic Transformation Towards AEC 2015" Fakultas Bisnis dan Pascasarjana Universitas Widya Mandala Katolik, 30 Oktober 2014 [Online]. Tersedia di <http://repository.wima.ac.id/982/1/ETR005%20-%20Budiarto%20Tedjasuksmana.pdf> (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2016).

